

### **BAB III**

#### **ANALISA PERMASALAHAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

Pada bab ini akan membahas tentang bentuk permasalahan kemiskinan di Indonesia. Berisi penjabaran tentang berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia, yang akan menjelaskan mengenai beberapa penyebab kemiskinan di Indonesia beserta data-data kemiskinan dari tahun 2014 – 2018.

##### **A. Kemiskinan di Indonesia tahun 2004 – 2018**

Kemiskinan menurut BPS yaitu keluarga yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan ciri-ciri atau kriteria sebagai berikut:

- a. Pembelanjaan rendah atau berada di bawah garis kemiskinan, yaitu kurang dari Rp. 175.324 (masyarakat perkotaan dan Rp. 131.256 (masyarakat pedesaan) dengan hitungan per orang per bulan di luar kebutuhan non pangan.
- b. Tingkat pendidikan rendah dan tidak ada keterampilan.
- c. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak (termasuk tidak memiliki MCK).
- d. Pemilikan harta sangat terbatas nilai atau jumlahnya.
- e. Hubungan sosial terbatas (belum banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan).
- f. Akses informasi pada koran, radio, televisi, dan internet terbatas. (Badan Pusat Statistik)

Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin absolut sebesar 36,1 juta jiwa atau 16,66% dari total penduduk di Indonesia. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 - 2004 menurun sebesar 3,19%. Sementara dilihat dari presentase penduduk miskin di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan, yaitu 20,11% untuk pedesaan dan 12,13% untuk perkotaan.

Dari angka kemiskinan tahun 2004 antar provinsi terlihat ada 6 provinsi yang dapat dikategorikan memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah (angkanya berada di bawah 10%). Keenam provinsi tersebut adalah Provinsi Bangka Belitung (9,07 persen), Provinsi Sulawesi Utara (8,94 persen), Provinsi Banten (8,58 persen), Provinsi Kalimantan Selatan (7,19 persen), Provinsi Bali (6,85 persen), dan Provinsi DKI Jakarta (3,18 persen). Dari 24 provinsi lainnya, masing-masing terdapat 11 provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin antara 10-20 persen dan 20-30 persen, serta hanya 2 provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin di atas 30 persen. Dua provinsi yang memiliki persentase penduduk terbesar (di atas 30 persen) adalah Provinsi Papua (38,69 persen) dan Provinsi Maluku (32,13 persen). Sedangkan lima provinsi yang memiliki persentase penduduk terbesar dalam kelompok 20-30 persen adalah Provinsi Gorontalo (29,01 persen), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (28,47 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (27,86 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (25,38 persen), dan Provinsi Bengkulu (22,39 persen). Serta lima provinsi yang memiliki persentase penduduk terbesar dalam kelompok 10-20 persen adalah Provinsi DI Yogyakarta (19,06 persen), Provinsi Sulawesi Selatan (14,97 persen), Provinsi Sumatera Utara (14,92 persen), Provinsi Kalimantan Barat (13,93 persen), dan Provinsi Riau (13,15 persen). Dapat dilihat distribusi penduduk pada tahun 2004 menurut daerah, distribusi menunjukkan 31,45 persen penduduk miskin berdomisili di daerah perkotaan dan 68,55 persen ditempatkan di daerah pedesaan. Penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan. Demikian pula hal ini terjadi jika dilihat menurut provinsi. Kondisi ini ikut menguatkan partisipasi penduduk miskin di Indonesia secara umum terkonsentrasi di daerah pedesaan, terlihat dari distribusi penduduk miskin di daerah pedesaan sekitar dua kali lipat di daerah perkotaan. Ada tiga provinsi yang memiliki kontribusi lebih dari 10 persen penduduk miskin di wilayahnya terhadap total penduduk miskin Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur (20,23 persen), Provinsi Jawa Tengah (18,93 persen), dan Provinsi Jawa Barat (12,88 persen). (Badan Pusat Statistik, 2004)

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 2004-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa
2004	11,37	24,78	36,15	12,13	20,11	16,66	143 455	108 725
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97	165 565	117 365
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75	174 290	130 584
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58	187 942	146 837
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42	204 896	161 831
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15	222 123	179 835
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33	232 989	192 354
Maret 2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49	253 016	213 395
September 2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36	263 594	223 181
Maret 2012	10,65	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96	267 408	229 226
September 2012	10,51	18,09	28,59	8,60	14,70	11,66	277 382	240 441
Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37	289 042	253 273
September 2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47	308 826	275 779
Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25	318 514	286 097
September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96	326 853	296 681
Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22	342 541	317 881
September 2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13	356 378	333 034
Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86	364 527	343 647
September 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70	372 114	350 420
Maret 2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64	385 621	361 496
September 2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12	400 995	370 910

*Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen), naik 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta (dari 11,91 juta pada Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada Maret 2010), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang (dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta pada Maret 2010). Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Pada Maret 2009, 63,38 persen penduduk miskin berada di perdesaan, sedangkan pada Maret 2010 sebesar 64,23 persen.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2010, kontribusi Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,5 persen, sedangkan pada Maret 2009 sebesar 73,6 persen. Komoditi makanan yang paling besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, kopi, dan tahu. Untuk komoditas bukan makanan adalah perumahan, listrik, angkutan, dan pendidikan. Pada periode Maret 2009-Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan risiko menurun. Ini pertambahan rata-rata populasi miskin semakin bertambah. Kemiskinan dan semakin tinggi populasi miskin semakin bertambah.

Sebagian besar penduduk miskin (64,65 persen pada tahun 2009) bekerja di Sektor Pertanian. NTP (Nilai Tukar Petani) naik 2,45 persen dari 98,78 pada Maret 2009 menjadi 101,20 pada Maret 2010. Rata-rata upah harian buruh tani dan buruh bangunan masing-masing naik sebesar 3,27 persen dan 3,86 persen selama periode Maret 2009-Maret 2010. Perekonomian Indonesia Triwulan I 2010 tumbuh sebesar 5,7 persen terhadap Triwulan I 2009, sementara meningkatkan konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,9 persen pada periode yang sama.

Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), meningkat sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang berjumlah 27,73 juta orang (10,96 persen).

Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015. Selama periode September 2014 - Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2015 sebesar 73,23 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2014 yaitu sebesar 73,47 persen. Komoditas makanan yang menentang nilai besar Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, tahu, dan kopi. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan gratis, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. (Badan Pusat Statistik, 2015, hal. 1)

- 1) Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2016, maka selama enam bulan ini terjadi jumlah populasi miskin sebesar 0,25 juta orang. Sementara mengganti dibandingkan dengan September tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0,75 juta orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2016 – September 2016, jumlah penduduk miskin di daerah meningkat sebesar 0,15 juta sebaliknya daerah perdesaan semakin menurun sebesar 0,39 juta orang. Beberapa faktor yang terkait dengan jumlah penurunan dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2016 – September 2016 antara lain adalah:
  - 1) Selama periode Maret 2016 – September 2016 terjadi penurunan sebesar 1,34 persen.
  - 2) Pada periode Maret 2016 – September 2016, dengan harga eceran beras nasional, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras Rata-rata harga beras turun 1,21 persen yaitu dari Rp13.301,00 per kg pada Maret 2016 menjadi Rp13.140,00 per kg pada September 2016. Harga rata-rata cabai merah naik turun sebesar 14,06 persen yaitu dari Rp45 .554,00 per kg pada bulan Maret 2016 menjadi Rp39.151,00 per kg pada bulan September 2016. Adapun cabai rawit meningkat sebesar 13,77 persen dan telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 0,56 persen.
- 2) Nominal rata-rata upah buruh tani per hari pada September 2016 naik sebesar 1,42 persen dibandingkan upah buruh tani per hari Maret 2016, yaitu dari Rp47.559,00 menjadi Rp48.235,00.
- 3) Selain itu, rata-rata upah buruh bangunan per hari pada September 2016 naik sebesar 1,23 persen dari upah buruh tani per hari Maret 2016, yaitu dari Rp81.481,00 menjadi Rp82.480,00.
- 4) Nilai Tukar Petani nasional September 2016 sebesar 102,02 atau naik 0,69 persen dari Nilai Tukar Petani bulan Maret 2016 yang sebesar 101,32. (Badan Pusat Statistik, 2017)

**Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2015**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<i><b>Perkotaan</b></i>		
September 2015	10,62	8,22
Maret 2016	10,34	7,79
September 2016	10,49	7,73
<i><b>Perdesaan</b></i>		
September 2015	17,89	14,09
Maret 2016	17,67	14,11
September 2016	17,28	13,96
<i><b>Total</b></i>		
September 2015	28,51	11,13
Maret 2016	28,01	10,86
September 2016	27,76	10,70

*Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2015, Maret 2016, dan September 2016*

**Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau, September 2016**

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	2,06	4,15	6,21	9,07	12,36	11,03
Jawa	7,04	7,79	14,83	7,72	13,94	10,09
Bali dan Nusa Tenggara	0,59	1,53	2,11	9,89	18,11	14,72
Kalimantan	0,28	0,69	0,97	4,35	8,07	6,45
Sulawesi	0,39	1,70	2,09	5,75	13,84	10,97
Maluku dan Papua	0,12	1,42	1,55	5,51	29,61	21,98
<b>Indonesia</b>	<b>10,49</b>	<b>17,28</b>	<b>27,76</b>	<b>7,73</b>	<b>13,96</b>	<b>10,70</b>

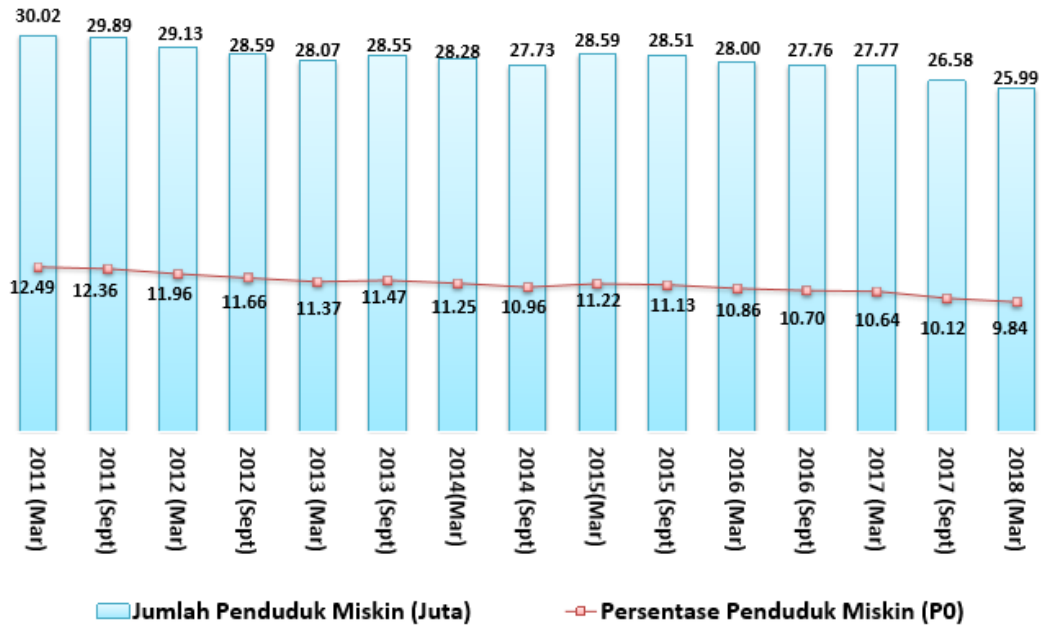
*Sumber: Diolah dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), September 2016*

Tabel 3.2 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut pulau pada September 2016. Dari tabel tersebut terlihat persentase penduduk miskin terbesar di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 21,98 persen, sementara jumlah penduduk miskin lebih rendah di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6,45 persen. Dan dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (14,83 juta orang); Jumlah penduduk terendah di Pulau Kalimantan (0,97 juta orang).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Perubahan Kemiskinan di Indonesia, Periode September 2017 – Maret 2018:

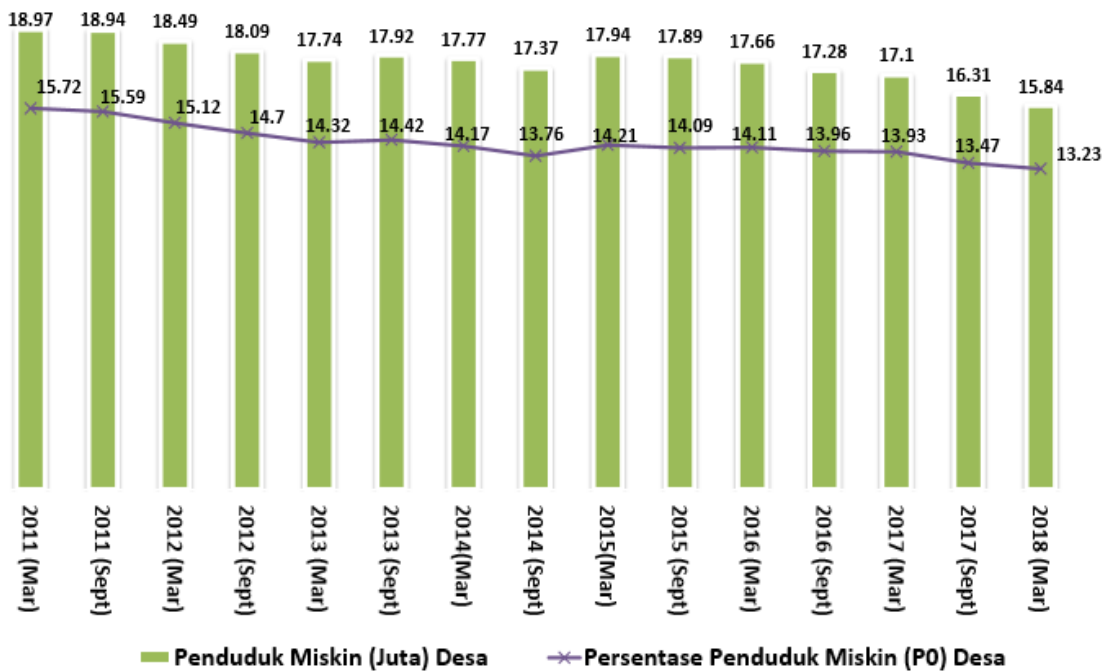
- 1) Selama periode September 2017 - Maret 2018 terjadi penurunan umum sebesar 1,92 persen. Sedangkan pada periode Maret 2017 - Maret 2018 terjadi inflasi umum sebesar 3,40 persen.
- 2) Nominal rata-rata upah buruh tani per hari pada Maret 2018 naik sebesar 2,76 persen dibandingkan September 2017 (dari Rp50.213,00 menjadi Rp51.598,00). Namun, upah riil buruh tani per hari pada Maret 2018 turun sebesar 0,29 persen dibandingkan September 2017, yaitu dari Rp37.711,00 menjadi Rp37.602,00.
- 3) Upah nominal buruh bangunan per hari pada Maret 2018 naik sebesar 1,78 persen dari September 2017, yaitu dari Rp84.378,00 menjadi Rp85.880,00. Upah real buruh bangunan per hari pada Maret 2018 naik sebesar 0,14 persen dari September 2017, yaitu dari 64.867,00 menjadi Rp64.776,00.
- 4) Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2018 turun sebesar 0,27 persen dari September 2017, yaitu dari 102,22 menjadi 101,94 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2018 naik sebesar 0,37 persen poin, dibandingkan keadaan pada Agustus 2017 yaitu dari 5,50 persen menjadi 5,13 persen.
- 5) Pada periode September 2017 - Maret 2018, secara nasional harga eceran daging sapi, minyak goreng, gula pasir meningkat. Namun demikian, terdapat kenaikan harga beras pada periode September 2017 - Maret 2018 sebesar 8,57 persen.
- 6) Pada periode November 2017 - Februari 2018, bantuan pangan non-tunai (BPNT) telah disediakan untuk rumah tangga. (Badan Pusat Statistik, 2018)

Gambar 3.1 Angka Kemiskinan Indonesia tahun 2011 - 2018



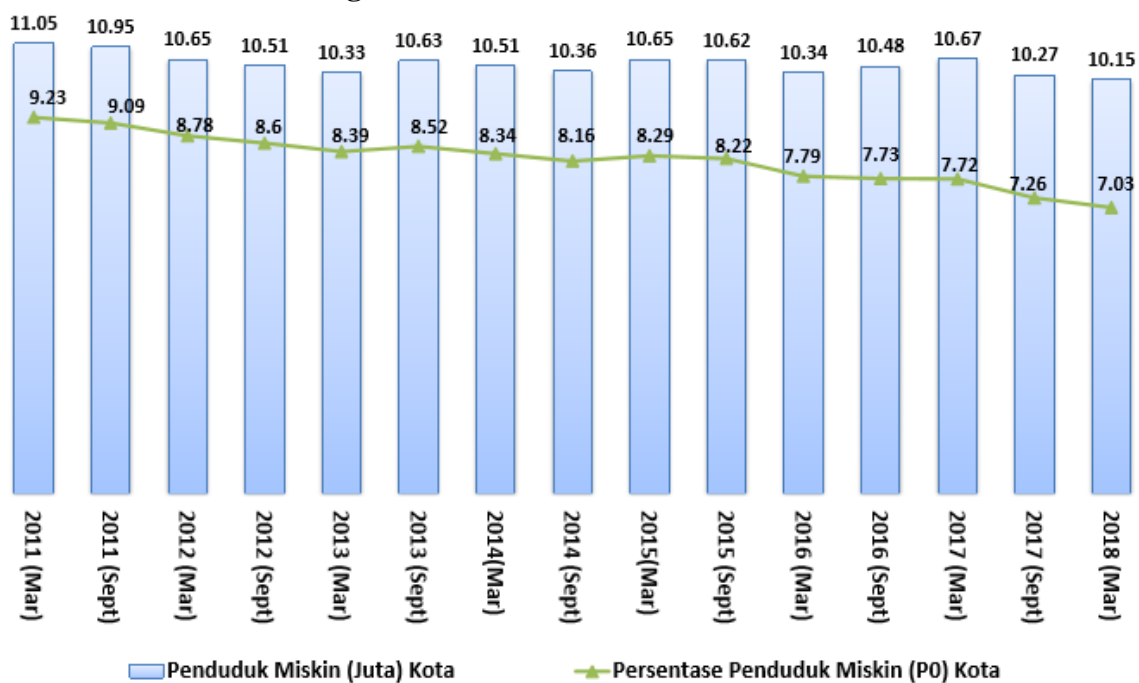
Sumber: Badan Pusat Statistik, Perhitungan Angka Kemiskinan Maret 2018

Gambar 3.2 Angka Kemiskinan Daerah Perkotaan tahun 2011 - 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, Perhitungan Angka Kemiskinan Maret 2018

Gambar 3.3 Angka Kemiskinan Daerah Pedesaan tahun 2011 - 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, Perhitungan Angka Kemiskinan Maret 2018

## **B. Penyebab kemiskinan di Indonesia**

### **1. Garis Kemiskinan Makanan dan Bahan Makanan**

Selama Maret 2009-Maret 2010, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,72 persen, yaitu dari Rp200.262, - per kapita per bulan pada Maret 2009 menjadi Rp211.726, - per kapita per bulan pada Maret 2010. Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan ( GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat terkait dengan peran komoditas pangan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas pangan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2009 kontribusi GKM terhadap GK sebesar 73,6 persen, dan sekitar 73,5 persen pada Maret 2010. Pada Maret 2010, komoditi makanan yang memberi kontribusi terbesar pada Garis Kemiskinan adalah beras sebesar 25,20 persen di perkotaan dan 34,11 persen di pedesaan. Rokok kretek filter memberikan kontribusi terbesar ke Garis Kemiskinan (7,93 persen di perkotaan dan 5,90 persen di pedesaan). Komoditi lainnya adalah gula pasir (3,36 persen di perkotaan dan 4,34 persen di pedesaan), telur ayam ras (3,42 persen di perkotaan dan 2,61 di pedesaan), mie instan (2,97 persen di perkotaan dan 2,51 persen di pedesaan), tempe (2,24 persen di perkotaan dan 1,91 persen di pedesaan), bawang merah (1,36 persen di perkotaan dan 1,66 persen di pedesaan), kopi (1,23 persen di pedesaan) dan 1,56 persen di pedesaan), dan tahu (2,01 persen di pedesaan dan 1,55 persen di pedesaan). Komoditi bukan makanan yang memberi kontribusi besar untuk Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan (8,43 persen di perkotaan dan 6,11 persen di pedesaan), biaya listrik (3,30 persen di perkotaan dan 1,87 persen di pedesaan), dan angkutan ( 2,48 persen di perkotaan dan 1,19 persen di pedesaan), dan biaya pendidikan (2,40 persen di perkotaan dan 1,16 persen di pedesaan). (Badan Pusat Statistik, 2010)



**Tabel 3.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 2004 – 2010**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33

*Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

**Tabel 3.5 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) September 2016**

Jenis komoditi	Perkotaan	Jenis komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Makanan:</b>	<b>69,84</b>	<b>Makanan:</b>	<b>77,06</b>
Beras	18,31	Beras	25,35
Rokok	10,70	Rokok	10,70
Daging sapi	4,98	Daging sapi	3,47
Telur ayam ras	3,18	Gula pasir	3,01
Daging ayam ras	3,10	Telur ayam ras	2,76
Mie instan	2,43	Mie instan	2,28
Gula pasir	2,02	Daging ayam ras	2,19
Bawang merah	1,77	Bawang merah	2,10
Tempe	1,62	Kopi bubuk & kopi instan	1,58
Tahu	1,57	Tempe	1,53
Makanan Lainnya	20,16	Makanan Lainnya	22,09
<b>Bukan Makanan:</b>	<b>30,16</b>	<b>Bukan Makanan:</b>	<b>22,94</b>
Perumahan	9,81	Perumahan	7,63
Listrik	2,86	Bensin	2,31
Bensin	2,84	Listrik	1,59
Pendidikan	2,49	Pendidikan	1,49
Angkutan	1,70	Perlengkapan mandi	1,04
Perlengkapan mandi	1,28	Kayu bakar	0,90
Bukan Makanan Lainnya	9,18	Bukan Makanan Lainnya	7,98
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>Total</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2016*

Pada tahun 2016, peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2016 yang diterima sebesar 73,19 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2016 sebesar 73,50 persen. Jenis komoditi makanan yang dilindungi terhadap Nilai Garis Kemiskinan di perkotaan juga di pedesaan, di percaya adalah beras, rokok, daging sapi, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah dan tempe. Munculnya daging sapi sebagai salah satu komoditi penyumbang terbesar Garis Kemiskinan pada periode September 2016 bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan terbesar pengaruhnya adalah perumahan, listrik, bensin, dan pendidikan. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 3.8 yang berkaitan dengan komoditi makanan masih jauh lebih besar daripada hubungan komoditas , dan kesehatan). Besarnya kontribusi GKM terhadap GK pada September 2016 sebesar 73,19 persen. Pada September 2016, komoditas yang memberikan kontribusi terbesar di GK baik di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya sama, yaitu beras yang memberikan kontribusi sebesar 18,31 persen di perkotaan dan 25,35 persen di pedesaan. Rokok memberikan kontribusi terbesar terhadap GK urban dan pedesaan, yaitu sebesar 10,70 persen. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada September 2016 terdapat daging sapi dalam komoditi besar penyumbang GK, yang memberikan kontribusi 4,98 persen untuk GK urban dan 3,47 persen untuk GK pedesaan. Munculnya daging sapi pada periode September 2016 bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,18 persen di perkotaan dan 2,76 persen di pedesaan), mie instan (2,43 persen di perkotaan dan 2,28 di pedesaan), dan seterusnya. Selain itu, dari Tabel 3.8 terlihat pula komoditi penyumbang terbesar GK yang berbeda antara urban dan pedesaan. Tahu komoditi hanya menjadi penyumbang GK urban dan kopi bubuk dan kopi instan hanya menjadi penyumbang GK pedesaan.

Komoditi bukan makanan yang memberikan kontribusi terbesar di GK urban dan pedesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan kamar mandi. GK di perkotaan dan pedesaan, yaitu angkutan yang hanya memberi kontribusi besar terhadap GK di perkotaan sebesar 1,70 persen dan kayu bakar yang hanya memberikan kontribusi besar terhadap GK pedesaan sebesar 0,90 persen . (Badan Pusat Statistik, 2017)

## **2. Kemiskinan Akibat Adanya Bencana Alam**

Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) sebuah Badan PBB untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana, Indonesia merupakan negara yang paling rawan bencana alam di dunia. Berbagai bencana alam mulai gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan rawan terjadi di Indonesia. Bahkan untuk beberapa jenis bencana alam, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban meninggal akibat peristiwa ini. Tak hanya kerugian material dan korban nyawa yang diakibatkan oleh bencana alam, namun bencana juga merupakan variabel meningkatnya angka kemiskinan. Kemiskinan yang muncul pasca bencana alam sering luput dari perhatian, termasuk pemerintah. Bencana alam dan kemiskinan ibarat lingkaran setan. Keduanya saling berpengaruh. Bencana menyebabkan kemiskinan, sebaliknya kemiskinan juga bisa menyebabkan bencana. Program mitigasi bencana yang intens adalah cara paling efektif mengedukasi masyarakat, terutama di daerah rawan. (Yendra, 2017)

Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya. Selama kurun waktu 1600 - 2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen oleh tanah longsor.

Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600-2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di antaranya diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut.

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya. Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Pada sisi lain laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering

terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilisasi manusia yang semakin tinggi. Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 220 juta jiwa yang terdiri dari beragam etnis, kelompok, agama dan adat-istiadat. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan dan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur yang merata dan memadai, terjadi kesenjangan pada beberapa aspek dan terkadang muncul kecemburuan sosial. Kondisi ini potensial menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi bencana nasional. (Bencana, 2017)

**Gambar 3.4** Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia Tahun 1815-2012



*Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
<https://www.bnpb.go.id/home/potensi>*

Salah satu contohnya adalah bencana Tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Tsunami tersebut menyebabkan kerusakan fisik yang sangat besar di sepanjang wilayah pantai Aceh. Hampir semua wilayah di pinggir-pinggir pantai di sapu bersih oleh air, terutama desa-desa yang berbatasan langsung dengan pinggir pantai. Menurut BRR (Badan Rekonstruksi & Rehabilitasi) Tsunami telah mengakibatkan di Aceh, 130.000 orang dipastikan meninggal dan 37.000 orang masih hilang. (total kerugian jiwa 167,000 orang). Sekitar 500.000 orang lainnya kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut. Kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai 4,8 milyar dolar AS. Sektor produktif saja menderita kerusakan yang diperkirakan mencapai 1,2 milyar dolar AS, dengan lebih dari 100.000 usaha kecil hancur dan lebih dari 60.000 petani paling tidak harus mengungsi untuk sementara. (Anto, 2018)

Tsunami dan gempa bumi yang terjadi di Samudera Hindia pada tahun 2004 telah menyebabkan kerugian dan kerusakan parah terhadap Aceh, baik dalam hal ekonomi maupun kemanusiaan. Masyarakat global, yang dipimpin oleh pemerintah Indonesia, mengerahkan upaya rekonstruksi dengan skala yang sangat besar bagi negara berkembang. Bersamaan dengan perkembangan ini dan juga didorong oleh trauma akibat tsunami, perjanjian perdamaian yang bersejarah dicapai oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tiga tahun memasuki upaya rekonstruksi, dengan sejumlah besar bantuan telah dibelanjakan,

laporan ini bertujuan untuk memberikan sedikit penerangan terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kemampuan penanggulangan bencana tahap awal dan upaya-upaya rekonstruksi dalam mengurangi kemiskinan di Aceh. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemiskinan pasca tsunami dan konflik kepada pemerintah provinsi dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dalam penyusunan kebijakan dan program yang lebih baik untuk mengurangi kemiskinan di Aceh. Selain itu, penting sekali bagi masyarakat internasional untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemiskinan di Aceh pasca tsunami, karena mereka mungkin akan menghadapi bencana serupa dan kebutuhan terhadap upaya-upaya rekonstruksi besar di masa depan.

Kemiskinan di Aceh sedikit meningkat pasca bencana tsunami, dari 28,4 persen pada tahun 2004 mencapai 32,6 persen pada tahun 2005. Wilayah yang terkena dampak tsunami mengalami peningkatan angka kemiskinan, namun pada tahun 2006 angka ini kembali ke tingkat sebelum tsunami, atau bahkan lebih kecil. Hal ini berlawanan dengan tingkat penurunan kemiskinan yang terjadi pada wilayah-wilayah lain di Indonesia. Peningkatan tersebut termasuk relatif kecil mengingat besarnya kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tsunami dan juga mencerminkan dampak yang positif dari upaya awal rekonstruksi. Tingkat kemiskinan lebih tinggi, segera setelah terjadinya tsunami, baik di wilayah-wilayah yang terkena dampak tsunami maupun konflik. Pada 2006, kemiskinan di wilayah yang terkena dan tidak terkena dampak tsunami tampak seimbang dan dampak konflik terhadap kemiskinan menurun pada tahun 2006. Data kemiskinan tingkat kabupaten menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi merupakan daerah yang berada di pedalaman pedesaan dan kabupaten-kabupaten yang lebih terpencil, sementara wilayah-wilayah sekitar Banda Aceh memiliki tingkat kemiskinan paling rendah. Analisis peralihan masuk dan keluar dari kemiskinan mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat membantu rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan, seperti kepemilikan usaha-usaha non-pertanian, diversifikasi tanaman pertanian, bantuan bencana atau pendidikan dari kepala rumah tangga.

Kemudian tingkat kemiskinan menurun pada tahun 2006 hingga mencapai 26,5 persen, lebih rendah dari tingkat kemiskinan sebelum tsunami, menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan yang berkaitan dengan tsunami tidak berlangsung lama dan aktivitas rekonstruksi kemungkinan besar memfasilitasi penurunan tersebut. Pada tahun 2006, tingkat kemiskinan di Aceh menurun, sementara tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah lain meningkat. Walaupun demikian, kemiskinan di Aceh tetap jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Kemiskinan di Aceh sebagian besar merupakan fenomena pedesaan, dengan lebih dari 30 persen rumah tangga di pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini dibandingkan dengan tingkat rumah tangga miskin di wilayah perkotaan yang kurang dari 15 persen. Karakteristik lainnya yang terkait dengan tingginya tingkat kemiskinan yaitu ukuran rumah tangga yang lebih besar, tingkat pendidikan yang lebih rendah, rumah tangga yang dikepalai perempuan, dan rumah tangga dengan mata pencaharian di bidang pertanian. Hubungan antara karakteristik ini dengan kemiskinan masih tetap relatif stabil setelah masa tsunami yang menunjukkan bahwa faktor pokok penentu kemiskinan tidak berubah meskipun terjadi perubahan yang cepat dalam aspek politik dan sosial-ekonomi. (World Bank, 2018)

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.